



DUA TAHUN KISRUH UTANG MIGOR PEMERINTAH BAYAR ATAU JALUR HUKUM DITEMPUH?

KRONOLOGI UTANG MIGOR PEMERINTAH KE PERITEL

- Pada 2021 harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.
- Mendag saat itu, Muhammad Lutfi berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.
- Tahun 2022, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter. Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BDPKPS.



**GOVERNMENT (Hal.2)
Anwar Usman
Dilaporkan Sana-sini ;
KPK, PN Jakpus
hingga Bareskrim
Polri**

- Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.
- Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.
- Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Keluh kesah soal utang pemerintah kepada pelaku usaha terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) minyak goreng pada 2022 kembali mencuat. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku hingga dua tahun berlalu, tak melihat niatan baik dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara utang piutang tersebut. Menurut catatan, pengusaha ritel telah berulang kali menagih pembayaran hutang ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp 344 miliar, untuk 31 perusahaan yang memiliki kurang lebih 45.000 toko yang mengikuti program itu. Pihaknya siap untuk segera mengambil langkah hukum bila hingga akhir tahun ini tak ada kepastian. Terpisah, Kemendag mengungkapkan alasan mandeknya pembayaran utang rafaksi karena perbedaan angka pada klaim penagihan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan total tagihan rafaksi pada bulan Januari 2022 itu mencapai Rp 1,1 triliun. Sementara hasil verifikasi akhir Kemendag, keluar angka Rp 470 jutaan.

Anwar Usman Dilaporkan Sana-sini KPK, PN Jakpus hingga Bareskrim Polri



DERETAN LAPORAN TERKAIT ANWAR USMAN

PERSATUAN ADVOKAT DEMOKRASI INDONESIA

Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI) membuat laporan ke KPK dan Bareskrim Polri terkait putusan batas usia capres-cawapres yang dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka selaku keponakan Anwar Usman. Laporan ini berdasarkan putusan MKMK dan Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme terdapat unsur pidana.

WARGA DI KABUPATEN BANYUMAS

Layangkan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap mantan ketua MK, Anwar Usman. Gugatan itu diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun penggugat terdiri atas 5 orang advokat, 5 orang mahasiswa Hukum, 2 calon advokat dan juga 1 penulis. Mereka mendatangi PN Jakarta Pusat dengan didampingi oleh 18 advokat alumni Unsoed Purwokerto. Menuntut agar Anwar Usman mundur dari kursi hakim MK. Aan Rohaeni, pengacara serta juru bicara penggugat, mengungkapkan bahwa gugatan itu sudah didaftarkan sejak hari Senin (13/11/2023) dengan nomor perkara :756/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

AKTIVIS PRO DEMOKRASI

Tiga aktivis pro demokrasi melayangkan gugatan terhadap Anwar Usman dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kedua pihak diketahui digugat lantaran Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Gugatan dengan golongan perbuatan melawan hukum (PMH) ini diajukan oleh Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama. Dalam tuntutan, para penggugat juga menggugat Presiden RI Joko Widodo sebagai turut tergugat I dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sebagai turut tergugat II.

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa mereka bukan dari partai politik.

"Para penggugat itu bukan pengurus partai politik manapun. Bukan bagian dari tim sukses atau relawan. Sehingga gugatan ini diajukan para penggugat semata hanya demi memperjuangkan tegaknya marwah MK sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan merdeka dari campur tangan pihak manapun," tegasnya.

Tak hanya itu menurut Aan, paman dari Gibran Rakabuming ini juga diminta secara sadar supaya mundur dari hakim konstitusi setelah diberi sanksi berat oleh MKMK. "Gugatan yang diajukan oleh para penggugat memiliki tujuan yang bersifat tunggal agar Anwar Usman secara ksatria mundur dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi MK. Serta demi kepentingan bangsa dan negara, serta demi menghindari terjadinya konflik horizontal dan vertikal pasca Pemilu 2024," jelasnya.

JAKARTA-Polemik terkait eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman belum usai. Terbaru, dia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi atas dugaan perkara nepotisme. Laporan serupa juga dilayangkan ke Bareskrim Polri.

Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI) yang membuat laporan ke komisi anti-rasuah dan Polri. Ini berkaitan putusan batas usia capres-cawapres yang dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka selaku keponakan Anwar Usman.

"Dalam pemeriksaan MKMK disebutkan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat, salah satunya konflik kepentingan, itu tidak mengundurkan diri dalam pemeriksaan karena ada hubungan keluarga dengan orang yang diuntungkan beperkara tersebut," kata Charles Situmorang dari PADI di Gedung KPK, Rabu (15/11/2023).

Charles mengatakan laporan ini berdasarkan putusan MKMK dan Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme terdapat unsur pidana. "Jadi setiap penyelenggara negara yang melakukan perbuatan melawan hukum atau dengan cara melawan hukum menguntungkan kerabat atau keluarga dan merugikan kepentingan

bangsa dan negara itu diancam dengan pidana selama 2 tahun minimal dan maksimal 12 tahun. Atas dasar putusan MKMK itu kami mengajukan laporan," ujarnya.

Selain putusan MKMK, Charles menjelaskan bukti yang dilampirkan lainnya adalah putusan perkara Nomor 90, terdapat dissenting opinion dari dua Hakim MK. "Kemudian laporan dari Majalah Tempo, terus laporan-laporan perihal saudara Gibran yang mempunyai kedudukan hukum atas putusan perkara 90," kata dia.

Sebelumnya Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan Ketua MK, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam perkara uji materi terkait syarat capres cawapres dari unsur kepala daerah.

Menurut Jimly, Anwar terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023. Anwar kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Buntut kasus tersebut, Anwar Usman lebih dulu dilaporkan ke KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara. KPK sudah melakukan klarifikasi tahap pertama kepada pelapor beberapa waktu lalu.

Juga Dilaporkan ke PN Jakpus

Beberapa pihak lain juga melayangkan gugatan terhadap adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Belasan warga di Kabupaten Banyumas melayangkan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap mantan ketua MK, Anwar Usman. Gugatan itu diajukan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun penggugat terdiri atas 5 orang advokat, 5 orang mahasiswa Hukum, 2 calon advokat dan juga 1 penulis. Mereka mendatangi PN Jakarta Pusat dengan didampingi oleh 18 advokat alumni Unsoed Purwokerto. Adapun maksud kedatangannya yaitu menuntut agar Anwar Usman mundur dari kursi hakim MK. Aan Rohaeni, pengacara serta juru bicara penggugat, mengungkapkan bahwa gugatan itu sudah didaftarkan sejak hari Senin (13/11/2023) dengan nomor perkara :756/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

"Alasan gugat itu didaftarkan agar marwah dari Mahkamah Konstitusi tetap tegak. Sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan juga merdeka dari campur tangan pihak manapun," ungkap Aan lewat siaran persnya.

Aan menyebutkan, bahwa para penggugat tak mempunyai kepentingan langsung dengan ketiga

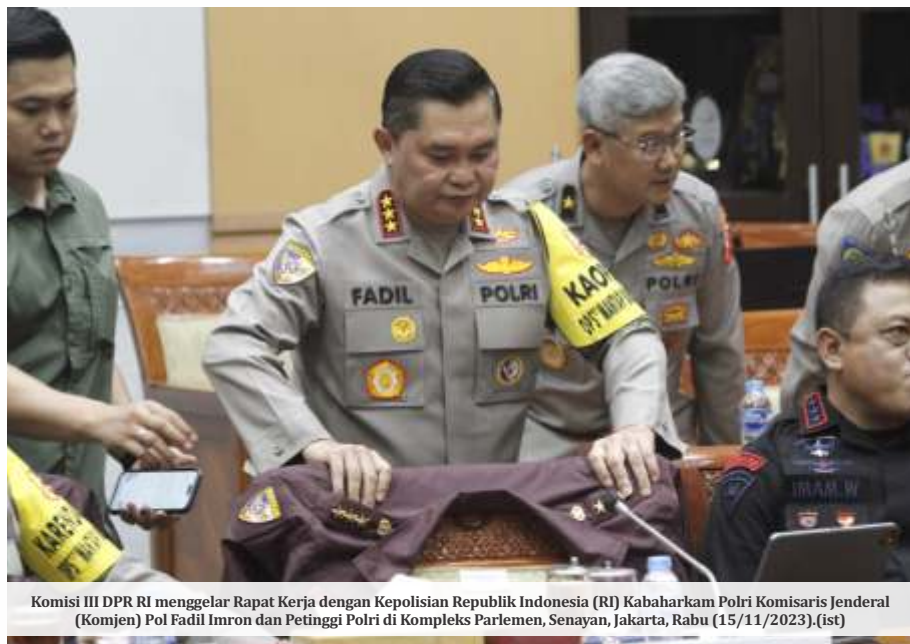
Hal serupa dilakukan tiga aktivis pro demokrasi melayangkan gugatan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kedua pihak diketahui digugat lantaran Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2024.

Gugatan dengan golongan perbuatan melawan hukum (PMH) ini diajukan oleh Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama. Dalam tuntutan, para penggugat juga menggugat Presiden RI Joko Widodo sebagai turut tergugat I dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sebagai turut tergugat II.

Terhadap Anwar Usman, tiga aktivis pro demokrasi tersebut meninjau dan menilai bahwa mantan Ketua MK itu telah terlibat dalam konflik kepentingan dengan Gibran Rakabuming sebagai cawapres 2024.

Sebab, dalam gugatan 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres dan cawapres diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa kelahiran tahun 2000 dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah "pengagum" Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.(wid,rls,ist/dya)

Debat Sengit Komisi III DPR RI Saat Netralitas Polri Diragukan di Pemilu 2024



Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia (RI) Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Fadil Imron dan Petinggi Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023). (ist)

JAKARTA-Terjadi debat sengit antara anggota DPR RI, khususnya Komisi III saat rapat Komisi III dengan Polri, Rabu (15/11/2023). Masalah utamanya adalah soal netralitas polisi di Pemilu 2024 nanti.

Wakil Ketua Komisi III dari NasDem Ahmad Sahroni sebagai pimpinan rapat menanggapi sejumlah pernyataan dari anggota Komisi III dari PDIP lainnya, Safaruddin. Safaruddin menyampaikan sejumlah catatannya soal ketidaknetralan Polri jelang Pemilu 2024.

"Yang tadi Pak Safaruddin sampaikan menarik, Pak. Tapi lebih baik lebih bagus disertakan bukti agar terlihat jelas dan tidak menuduh atau katanya," kata Sahroni.

Sebelum Safaruddin menyampaikan, "Kalau Polri ikut bermain, siapa di situ terus siapa yang mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kekacauan itu kalau polisi ikut bermain," ujar Safaruddin.

Ia tak menyinggung detail soal kata 'bermain' ini. Hanya Safaruddin menyebut dugaan Polri ikut melakukan penggalangan.

"Ini kan masalah penggalangan sasarannya pasti pengamanan. Tapi bisa berbelok ke penggalangan untuk memenangkan kelompok kelompok tertentu. Itu kira-kira masalah netralitas Polri," ujar dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi narasi bahwa Polri tidak netral. Habiburokhman menilai pihak yang menyebut Polri tidak netral mungkin karena ada kepentingan yang terganggu.

"Orang bicara polri tidak netral ya mungkin saja karena kepentingannya terganggu, atau ada persoalan lain," kata Habiburokhman dalam rapat Komisi III DPR bersama dengan Kabaharkam di Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Habiburokhman juga menyinggung isu tersebut yang sampai dibahas di rapat. Dia menyebut sikap politisi yang kerap teriak ketika kakinya terinjak. Namun kata Habiburokhman, jika ada kaki orang lain yang terinjak, belum tentu dia akan berbicara.

"Ya beginilah politisi Pak Fadil, kami itu teriak kalau kaki kami terinjak, Pak. Jadi kalau kaki orang terinjak, kami belum tentu teriak, ya hal yang biasa. Jadi semua orang itu punya sudut pandang, punya perspektif," ucapnya.

Untuk itu, Habiburokhman mengatakan cara terbaik Polri agar dianggap netral adalah dengan melakukan tugas sesuai undang-undang. Dengan begitu, menurutnya, tidak perlu menguras tenaga untuk menanggapi desakan polisi harus netral.

"Oleh karena itu, satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain bagi Polri adalah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

"Kalau itu bisa dijamin, saya pikir ya akan menguras energi kalau kita tanggap desakan yang satu 'Pak Polri harus Netral harus lakukan ini kalau ingin dianggap netral' padahal yang didesak untuk dilakukan oleh Polri itu di luar ketentuan undang-undang yang berlaku," tambahnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Johan Budi, angkat bicara mengenai isu netralitas Polri. Ia meyakini, Polri sebagai lembaga negara akan terus netral dalam Pilpres 2024. "Polri mengalami ujian paling berat dibanding Pemilu sebelumnya. Saya sampai hari ini meyakini Polri sebagai lembaga, netral dalam melakukan tugas tupoksinya sebagai lembaga," kata Johan dalam Rapat

Kerja Komisi III dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat Rabu (15/11/2023).

Meski yakin Polri mampu bersikap netral, Johan menegaskan, pihaknya tidak bisa menghalangi keluarga dari anggota Polri jika memiliki keinginan untuk mendukung pasangan tertentu. "Tapi tentu para pegawai atau pejabat Polri tentu tidak boleh juga dihalangi punya interest tertentu favoritkan 1 atau 2 orang itu sah-sah saja," ucapnya.

Namun demikian, Johan menegaskan, anggota Polri tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk mendukung paslon pilihannya. "Tapi jangan sampai interest itu kemudian digunakan dengan menggunakan kewenangannya," tandas dia.

Polri: Tak Perlu Diulang-ulang

Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imron menanggapi soal isu netralitas Polri yang selalu dipertanyakan. Fadil mengatakan bahwa soal netralitas Polri tidak perlu disampaikan berulang-ulang karena telah menjadi komitmen.

"Sebenarnya internalisasi tentang netralitas ini tidak perlu lagi disampaikan secara gamblang dan berulang-ulang," kata Fadil dalam rapat bersama Komisi III DPR, di kompleks parlemen Senayan, Rabu (15/11/2023).

Fadil menjelaskan bahwa terkait netralitas telah ditanamkan kepada anggota Polri sejak mengenyam pendidikan. Hal itu ditanamkan dalam kode etik kepolisian. "Terkait netralitas, jadi kami-kami ini mulai dari akademi kepolisian masuk PTIK masuk Sespim, pasal-pasal tentang undang-undang kepolisian, kemudian kode etik kepolisian sudah kami di sampaikan," sebutnya.

Namun, kata dia, saran saat diskusi dengan Komisi III DPR agar Polri dapat menjaga netralitasnya akan dicatat. Saran itu akan tetap disampaikan kepada pimpinannya. "Tapi saran dari forum Komisi III ini harus ada penyampaian khusus nanti akan saya sampaikan ke Kapolri," ujar dia.

Jika dilihat dalam aturan, netralitas Polri diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Komjen Fadil Imron mengatakan jika Polri telah membentuk wilayah Operasi Mantap Brata. Wilayah tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu Operasi Pusat, Operasi Daerah, dan Operasi Polres. (wid,rls,ist,ant/dya)

DUGAAN INTIMIDASI BAGI RELAWAN



KUBU
GANJAR PRANOWO -
MAHFUD MD

Didatangi Polisi

- Empat polisi datang ke kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 4 November 2023, yang bertanya ihwal aktivitas pengurus di kantor.

- Polisi datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 8 November 2023.

Dugaan Pembakaran dan Pencopotan Baliho

- Pembakaran baliho Ganjar di Desa Lanto, Buton Tengah, Sulawesi Selatan, Selasa, 5 September 2023. Polisi menangkap pelaku, yakni seorang polisi dan warga.

- Pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud di Bali pada 31 Oktober 2023. Baliho dan bendera partai politik terpasang saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja dari Denpasar hingga Gianyar.

- Baliho bergambar Ganjar Pranowo di Pematang Siantar, Sumatera Utara, dicopot pada Sabtu, 11 November 2023. Saat itu Ganjar tengah menemui para pendukungnya.

Pembatalan Acara

- Acara pembekalan 1.500 pekerja migran Indonesia di gedung di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibatalkan pada Rabu, 8 November 2023. Pemilik gedung milik pemerintah itu diduga melarang acara tersebut karena mengundang Ganjar.



KUBU
ANIES BASWEDAN -
MUHAIMIN ISKANDAR

Pembatalan kegiatan

- Muhaimin Iskandar batal membuka acara MTQ di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada Selasa, 5 September 2023. Diduga dilarang Bupati Tanah Laut Sukamta.

- Anies Baswedan batal hadir dalam diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat, pada Ahad, 8 Oktober 2023. Pemerintah Jawa Barat membatalkannya karena ada baliho Anies-Muhaimin.

Petistiwa Lain

- Awal November 2023 Keluarga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melki Sedek Huang diduga diintimidasi aparat TNI di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki disebut aktif mengkritik kebijakan pemerintah.

- Awal November 2023 Akun Teater Utan Kayu dihapus YouTube. Alasannya, akun itu dianggap memuat konten terlarang. Penghapusan akun itu terjadi setelah Teater Utan Kayu menggelar dua diskusi "Beranda Filsafat". Diskusi itu bertajuk "Demokrasi dan Ancaman dari Dalam Dirinya".

KPK Lakukan OTT di Bondowoso, Dikabarkan 2 Pejabat Ditangkap



Suasana Polres Bondowoso yang dijadikan tempat pemeriksaan oknum ASN dan APH. (ist)

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kegiatan OTT itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

"Benar KPK tadi siang sekitar pukul 11.30 melakukan tangkap tangan di wilayah Bondowoso," kata Ghufron Rabu (15/11/2023).

Ghufron tak menjelaskan lebih jauh perihal perkara dilakukannya OTT di Kabupaten Bondowoso itu. Ia juga tak mengatakan sudah berapa orang yang ditangkap dan instansi apa. "Tim masih dalam proses pemeriksaan, nanti kami update setelah selesai," ujar Ghufron.

Ghufron menyatakan, KPK bakal menyampaikan hasil kegiatan tangkap tangan tim penindakan setelah para pihak yang diamankan selesai diperiksa. Berdasarkan Undang-Undang, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan tim penyidik.

Dihimpun dari informasi yang ada saat ini, dilakukannya OTT oleh KPK berhubungan dengan penyelidikan yang dilakukan Kejari Bondowoso perihal proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Bondowoso.

Lembaga antirasuah itu meringkus dua orang, yakni dari kalangan kejaksaan dan ASN Pemkab Bondowoso. Menurut informasi mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen. Santer kabar masalahnya diduga terkait suap kasus korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso.

Pj Bupati Bondowoso Bambang

Soekwanto mengaku mendengar kabar tersebut, namun juga belum bisa memastikan kebenaran peristiwa OTT. "Ya, tapi saya tidak tahu," katanya melalui sambungan teleponnya.

Kejari Bondowoso memang gencar menyelidiki dugaan korupsi proyek infrastruktur. Sejumlah paket proyek dalam bidikan korps Adhyaksa. "Ada beberapa penyelidikan terkait Pemkab Bondowoso yang sedang kami tangani sekarang," ungkap Kepala Kejari Bondowoso Puji Triasmoro melalui Kasi Pidsus Alexander Silaen, Senin (9/10/2023) lalu.

Kejari membidik dugaan korupsi anggaran proyek infrastruktur yang dijalankan oleh sejumlah instansi, terutama yang menyangkut infrastruktur. Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan ke pihak-pihak terkait.

Alexander kala itu menyatakan, belum saatnya untuk dibeber secara detail proyek-proyek yang dalam penyelidikan. Ia juga enggan mengungkap orang-orang terkait meski mereka sudah diperiksa oleh penyidik. "Tapi apa saja itu sampai sejauh mana masih proses," tutur jaksa kelahiran Medan, Sumatera Utara, 36 tahun silam itu.

Informasi yang terhimpun, target penyelidikan ini adalah proyek-proyek infrastruktur yang dananya bernilai besar atau mencapai miliaran rupiah. Di antaranya meliputi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan rakyat, dan fasilitas publik lainnya. Adapun sumber anggarannya dari APBD periode 2022-2023.

Bidikan kejaksaan merupakan proyek-proyek hasil tender. Sehingga, pihak-pihak terkait yang diperiksa disebut-sebut mulai kalangan ASN yang bertindak sebagai pengguna

anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia tender hingga para pengusaha selaku rekanan proyek.

Update Masiku, Akui Ada Info

Di sisi lain, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menjelaskan surat penangkapan Harun Masiku diterbitkan tiga pekan lalu karena ada informasi perihal keberadaan buronan kasus dugaan suap tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Ali sekaligus menjelaskan alasan pimpinan KPK baru menerbitkan surat penangkapan sementara Harun sudah 'menghilang' tiga tahun lamanya. "[Surat penangkapan] sebagai dasar bergerak ke suatu tempat tertentu, kapan pun bila dibutuhkan tergantung informasi yang masuk," ujar Ali saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (15/11/2023).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengatakan surat penangkapan sudah beberapa kali dikeluarkan. Termasuk ketika ada informasi keberadaan Harun di negara tetangga. "Sudah beberapa kali ada," kata Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku telah meneken surat perintah pencarian dan penangkapan buron kasus dugaan suap sekaligus mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku. "Tiga minggu lalu saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM [Harun Masiku]," ujar Firli dalam sesi tanya jawab konferensi pers kasus dugaan korupsi di Sorong, Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11/2023).

Tindakan tersebut menuai kritik. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman

menyatakan surat penangkapan tidak lagi diperlukan lantaran Harun sudah masuk red notice. "Itu hanya pengalihan isu dari pak Firli saja karena Harun Masiku itu kan sudah [masuk]red notice, ngapain bikin surat penangkapan. Itu otomatis. Kalau sudah tahu langsung tangkap saja, tidak usah koar-koar begitu," ujar Boyamin melalui pesan suara, Rabu (15/11/2023).

Boyamin meminta Firli tidak banyak cakap alias langsung saja menangkap Harun. Sebab, kata dia, masyarakat saat ini menunggu hasil kerja nyata dari lembaga antirasuah.

Harun harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. (wid,rls,ist/dya)

BEBERAPA OTT DI 2023



OTT BUPATI KEPULAUAN MERANTI, RIAU, MUHAMMAD ADIL

Ia dididik tim KPK pada Kamis (6/4/2023) yang bertepatan dengan Ramadhan. Ia diduga melakukan tiga klaster korupsi yakni, setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), suap pengadaan jasa travel umrah, dan menyuap Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M. Fahmi Aressa.



DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Kemudian, pada Rabu (12/4/2023) KPK menggelar OTT terkait dugaan suap Pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Mereka diduga melakukan korupsi suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.



WALI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, YANA MULYANA

Yana diduga menerima suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet program Bandung Smart City. Semua kasus dugaan korupsi tersebut menyangkut pengadaan barang dan jasa. Salah satu titik rawan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran adalah belanja barang dan modal.

Peringatan HPS ke-43, Gubernur Khofifah Ajak Bijak Pakai Air

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa isu krisis air merupakan salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan pangan. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk bijak dalam memakai air serta mempertahankan Jatim sebagai lumbung pangan.

Ajakan Gubernur Khofifah ini sesuai dengan tema Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-43 Tahun 2023 yaitu "Water is Life, Water is Food. Leave No One Behind" atau Air adalah Kehidupan, Air adalah Makanan. Jangan Tinggalkan Siapa Pun. Acara HPS ke-43 tahun 2023 Provinsi Jatim digelar di Jatim Expo Convention & Exhibition Surabaya, Rabu (15/11/2023).

"Oleh karena itu mari kita jadikan Tema Hari Pangan Sedunia tahun 2023 ini sebagai pengingat bahwa pentingnya pengelolaan air secara bijaksana," ujar Gubernur Khofifah.

"Atas dasar tema ini juga, kita memfokuskan pada pembangunan ketahanan pangan dengan memperhatikan kondisi real yang ada di Jawa Timur serta sebagai bentuk peringatan dan antisipasi terhadap terjadinya krisis pangan," tambahnya.

Gubernur Khofifah pun mengajak semua pihak menumbuhkan kesadaran dalam menggunakan air. Menurut Khofifah, air memiliki peran penting dalam membentuk lebih dari 50 persen tubuh makhluk hidup, menutupi sekitar 71 persen permukaan bumi, hingga menjadi kekuatan bagi manusia, perekonomian dan alam serta pondasi pangan.

"Kesadaran dalam penggunaan air menjadi penting lantaran pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, pembangunan ekonomi, dan perubahan iklim yang berdampak pada sumber daya air di bumi semakin terbatas," kata Khofifah.

Hal ini diperparah dengan, buruknya penggunaan dan pengelolaan air selama beberapa dekade, ekstraksi air tanah yang berlebihan serta polusi dan perubahan iklim, mengakibatkan ketersediaan serta kualitas air menurun dengan cepat yang akhirnya berujung pada krisis air.

"Oleh karena itu, mari kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan air. Kita perlu memproduksi lebih banyak pangan dan komoditas pertanian penting lainnya dengan lebih sedikit air, sambil memastikan air didistribusikan secara merata, sistem pangan tetap terjaga dan tidak ada seorangpun yang tertinggal," tuturnya.

Saat ini, lanjut Gubernur Khofifah, sekitar 2,2 miliar orang di dunia hidup di daerah yang mengalami kekurangan air. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,6 miliar pada tahun 2025.



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan beras di operasi pasar oleh Bulog, Rabu (15/11/2023)

"Krisis air juga dapat menyebabkan berkurangnya produksi pangan, meningkatkan harga pangan dan kelaparan. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan," tukas dia.

Jatim Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan, saat ini Jawa Timur menjadi tulang punggung lumbung pangan nasional. Selama tahun 2020 - 2022 Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi padi nomor 1 Nasional yaitu sebesar 9,526 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Bahkan tahun 2022 ketersediaan beras di Jatim juga surplus sebesar 2.410.862 ton.

"Angka sementara produksi padi di tahun 2023 sebesar 9,591 juta ton GKG atau setara beras sebesar 5,538 juta ton. Angka produksi ini lebih tinggi 64,9 ribu ton GKG dibandingkan angka tetap produksi tahun 2022 yang sebesar 9,526 juta ton GKG," terangnya.

Predikat Jatim sebagai lumbung pangan nasional juga terlihat dari kontribusi nomor 1 untuk komoditas jagung, cabe rawit, bawang merah, mangga, pisang dan mawar.

Hal serupa juga terjadi untuk komoditas pangan lain yang meliputi sapi potong, sapi perah, ayam petelur, daging, telur, susu, gula kristal tebu, tembakau dan garam yang juga merupakan nomor 1 Nasional.

Jawa Timur juga merupakan eksportir tertinggi Nasional untuk komoditas perikanan meliputi tuna, cakalang, tongkol dan udang.

"Ketahanan Pangan Jawa Timur saat ini dalam posisi sangat baik, bahkan mampu menjadi tulang punggung nasional. Ketersediaan beras kita tidak hanya surplus tapi juga mampu memenuhi kebutuhan di 18 provinsi lain. Kita hanya defisit pada kedelai dan bawang putih," ungkap Khofifah.

"Jadi mari kita bersama-sama

mempertahankan Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional. Pada tahun 2020 hingga 2022, kita merupakan produsen padi tertinggi di Indonesia, dimana pada tahun 2022 mencapai 9,526 juta ton GKG," ajaknya.

Selain bijak dalam menggunakan air dan mempertahankan predikat Jatim sebagai lumbung pangan nasional, Gubernur Khofifah juga mengajak sejumlah pihak untuk menjadikan HPS ke-43 sebagai momentum dalam menumbuhkan semangat kedaulatan pangan.

Semangat kedaulatan pangan yang dimaksudkan adalah kedaulatan pangan yang berbasiskan pada potensi sumber pangan lokal.

"Mari kita kembangkan potensi sumber pangan lokal. Kita kembangkan lagi potensi wilayah dengan keberagaman pangan sumber karbohidrat pangan lokal yang keseluruhannya dapat mewujudkan kedaulatan pangan," katanya

Jawa Timur, kata Gubernur Khofifah, kaya akan sumber pangan lokal yang kaya akan karbohidrat seperti umbi-umbian, sukun, porang, sorghum dan lainnya yang memiliki nilai gizinya setara beras.

Tentu dalam pengembangan potensi sumber pangan lokal, dibutuhkan inovasi, kreatifitas dan kolaborasi. Salah satu contoh inovasi dan kreatifitasnya adalah dengan melakukan Pengembangan Pertanian Berbasis Keluarga Berkelanjutan.

Modelnya pun terbilang sederhana, yakni dengan perluas Pekarangan Pangan Lestari (Peka Pari) melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan.

Pertanian Berbasis Keluarga dapat menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dan sekaligus sebagai penyedia pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Sementara dari segi kolaborasi, Gubernur Khofifah mengajak para Bupati/Walikota untuk menangani masalah pangan secara terpadu. Selain

itu kepada para ahli dari berbagai perguruan tinggi, ia meminta untuk melakukan riset dan pengembangan tentang peningkatan produksi dan produktifitas, seperti penemuan bibit unggul.

"Peringatan Hari Pangan Sedunia ini, marilah kita jadikan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stekholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup bergizi baik bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengapresiasi peran Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional dan memberikan kontribusi yang besar bagi pemenuhan pangan Indonesia.

"Ini patut diapresiasi, di daerah lain produksinya sedang turun tapi di Jawa Timur terus surplus bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan," kata Arief.

Ia pun berharap pada periode berikutnya produksi pangan di Jawa Timur lebih tinggi lagi, agar ketahanan pangan baik di daerah maupun nasional semakin kuat.

Prasana pertanian yang sudah matang di Jawa Timur dihimbanya untuk terus dioptimalkan dan didukung dengan kebijakan yang baik agar memperkuat eksistensi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

Selain itu, Arief juga meminta agar alih fungsi lahan dapat ditekan sehingga lahan untuk sawah dan perkebunan tetap ada dan tersedia di Jawa Timur.

"Terima kasih atas upaya keras dan komitmen yang diberikan oleh seluruh stakeholders di Jawa Timur semoga semangat ini terus tumbuh dan memberikan hasil yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dan saya berharap agar langkah-langkah inovatif dan kerjasama yang terus berkembang di provinsi Jawa Timur dapat menjadi contoh yang menginspirasi bagi daerah lainnya di seluruh Indonesia," katanya.

Usai gelaran peringatan HPS ke-43, Gubernur Khofifah juga berkesempatan meninjau stan Gerakan Pangan Murah yang di siapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim.

Stand pangan murah kali ini merupakan tindak lanjut dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di Jatim yang diejawantahkan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Adapun komoditas yang di sediakan pada Gerakan Pangan Murah adalah bawang merah 300kg dijual dengan harga 20rb/kg, bawang putih cutting 300kg harga 30rb/kg, cabe rawit 100kg dijual 60rb/kg dan cabe merah besar 100kg dijual 50rb/kg. (lut/dya)

Opsi Baru Pemkab soal Tol Malang-Kepanjen: Integrasikan dengan Jalur Lintas Selatan

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah mempertimbangkan opsi baru dengan mengintegrasikan jalur lintas selatan (JLS) dengan Tol Malang-Kepanjen yang merupakan proyek pemerintah pusat. Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan bila rencana itu terealisasi maka akan memudahkan akses ke potensi wilayah pantai Kabupaten Malang.

"Rencana pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen, sampai saat ini kita sedang berproses. Karena itu juga merupakan proyek dari pemerintah pusat. Kami di Pemkab Malang ini tentunya mendorong terus. Karena memang janjinya Pak Presiden Jokowi waktu itu, bagaimana agar Tol Malang-Kepanjen ini di tahun 2025 akan direalisasikan," ujar Didik, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (15/11/2023).

Sebelumnya, diketahui bahwa Kementerian PUPR RI sempat mempertimbangkan rute jalan Tol Malang-Kepanjen dari Cemorokandang ke Tajinan, kemudian mengarah ke Kepanjen. Selain itu, rute alternatif dari Cemorokandang, melalui Gadang, dan kemudian ke Pakisaji, juga sempat



Jalan Raya Tajinan, Kabupaten Malang, salah satu opsi trase proyek Jalan Tol Kepanjen-Malang. (Dok. Tangkapan Layar)

dipertimbangkan.

Merespon hal tersebut, Didik menegaskan bahwa dalam perkembangannya saat ini, trase tol bernilai Rp 15 miliar tersebut, akan mengarah ke timur, terhubung dengan jalur lintas selatan. "Informasinya agak muter ke timur. Jadi nanti sampai Kecamatan Pagelaran, baru muter ke barat, sehingga exit tol nanti masuk.

Nah dengan demikian harapan kita bisa mendekatkan wilayah pantai yang kita miliki," sambung Didik.

Disinggung terkait dengan rute dari Madyopuro ke Cemorokandang, Didik mengaku belum ada kepastian apakah rute tol akan langsung melalui Tajinan atau melewati wilayah Kota Malang terlebih dahulu. Namun, pihaknya kembali menegaskan bahwa

trase tol akan sedikit bergeser ke timur, dengan exit tol di Kecamatan Pagelaran.

"Nah itu saya kurang memahami seara pasti. Tapi yang jelas, rutenya agak menggeser ke timur, exit tolnya insyaallah di Kecamatan Pagelaran nanti," tegasnya.

Sementara itu, diketahui dari laman website Kementerian PUPR RI, simpulkpbu.pu.go.id. Menunjukkan bahwa progres proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen saat ini memiliki nilai Volume to Capacity Ratio (VCR) tertinggi pada Jalan Kolonel Slamet Supriyadi, Kecamatan Pakisaji yang merupakan batas Kota Malang - Kepanjen, dengan nilai 1,41. Hal tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan jalan yang tinggi.

Sedangkan nilai VCR terendah terletak di Jalan Sudanco Supriadi, Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan nilai 0,39 menandakan pemanfaatan yang lebih rendah. Di mana semakin tinggi nilai VCR, semakin dekat suatu jalan mencapai kapasitas maksimalnya. Dalam laman tersebut, juga menginformasikan bahwa proyek jalan tol ini masih dalam tahap persiapan lelang. (Santi/dya)

Pemkot Malang Targetkan Terima Prasarana Sarana Utilitas dari 40 Pengembang Tiap Tahun

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memiliki target ambisius, bisa melakukan serah terima Prasarana Sarana Utilitas umum (PSU) dari 40 pengembang perumahan tiap tahunnya. Hal itu terungkap dalam sosialisasi "Percepatan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas umum (PSU) pada Rabu (15/11/2023).

Sekretaris Dinas PUPR-PPK Kota Malang, Yani Prasetyo, mengatakan bahwa dari 396 pengembang perumahan di kota ini. Sebanyak 190 pengembang telah melakukan penyerahan berita acara administrasi PSU kepada Pemkot Malang.

"Jadi bagi pengembang yang belum punya berita acara PSU, kami stop untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nya, biar mereka mengurus PSU nya dulu sesuai dengan Perda Penyelenggaraan PSU kita tahun 2013. Jadi di awal pengembang mau membangun, itu harus mengurus siteplan di PMPTSP," ujar Yani, ditemui usai membuka acara sosialisasi tersebut, Rabu (15/11/2023).

Dalam kenyataan di lapangan, Yani menyebutkan bahwa para pengembang baru cenderung lebih antusias, sedangkan pengembang lama menurutnya kadang masih kesulitan dalam memahami proses baru.

Dalam mengatasi kendala ini. Yani

mengatakan bahwa Dinas PUPR-PPK telah menetapkan target, yaitu menerima 40 PSU di setiap tahunnya dari pengembang di Kota Malang. Kendati demikian, menurutnya di tahun 2023 ini, sebanyak 45 pengembang telah menyerahkan PSU kepada Pemkot Malang.

"Gak lama kok untuk penyerahan berita acara administrasi. Kayak anak mau daftar sekolah, kalau administrasinya semua penuh ya kita terima. Kita gak melihat ke lapangan dulu, nanti itu di berita acara penyerahan fisik. Kan itu rata-rata yang gak dipahami oleh pengembang yang lama. Mereka takut tanahnya ini diserobot oleh Pemkot karena memang harus ditangani Pemkot," jelasnya.

Lebih lanjut, Yani menekankan pentingnya kesadaran pengembang untuk segera menyerahkan berita acara administrasi PSU kepada Pemkot Malang. Pihaknya menjelaskan bahwa hal ini dapat memudahkan Pemkot dalam mencari berkas PSU, termasuk mempermudah Pemkot dalam menangani adanya kerusakan sarana prasarana umum yang terjadi di dalam kawasan perumahan.

Tak hanya itu, pentingnya penyerahan fisik oleh pengembang diakui Yani sebagai langkah penting yang harus tercatat di Badan



Sekretaris Dinas PUPR-PPK Kota Malang, Yani Prasetyo, dalam sambutannya pada Sosialisasi Percepatan Penyerahan PSU di Kota Malang, Rabu (15/11/2023). (Santi/Lenteratoday)

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Menurutnya, sertifikasi PSU termasuk jalan, dan tanah, merupakan bagian dari arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Penyerahan fisik PSU itu kan harus tercatat juga di BKAD. Jadi sesuai dengan arahan dari Menteri ATR/BPN, semua bidang tanah kan harus bersertifikat, jalan dan PSU itu semua harus bersertifikat. Bukti kepemilikannya itu harus di siapa, kan gak mungkin ke pengembang. Pengembang ini kan sebatas dia membangun kemudian unitnya selesai, dia pindah lagi ke wilayah lain,"

uraikan Yani.

Yani juga menekankan peran konsumen dalam memastikan keberlanjutan proses ini. Pihaknya menyarankan agar konsumen mengecek apakah PSU perumahan telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemda setempat, sebelum membeli rumah.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah masalah di masa mendatang. Pasalnya dengan sertifikat PSU yang tercatat, menurut Yani, Pemkot dapat turun tangan dalam menangani permasalahan seperti kerusakan jalan yang terjadi di dalam wilayah perumahan. (Santi/dya)

NIRINA ZUBIR

Kehilangan Warna Hidup di "JESEDEF"

AKTOR seni peran Nirina Zubir berbagi pengalaman pribadi kala memerankan karakter seorang wanita bernama Hana yang kehilangan warna dalam hidupnya setelah sang suami meninggal dalam film layar lebar "Jatuh Cinta Seperti di Film-film (JESEDEF)".

Nirina, dalam keterangan pers, Selasa, menceritakan kesedihannya ditinggal sang ibu beberapa tahun lalu. Dia sangat sedih karena sang ibu meninggal ketika sedang tidur, sementara sebelum sang ibu terlelap, mereka masih ngobrol.

"Kalau kita ditinggal meninggal karena sakit, ibarat kita bisa mempersiapkan. Tapi, ini Mama meninggal dalam tidur dan sebelumnya kami masih ngobrol. Dan

itu rasanya benar-benar kayak semua hilang. Kehilangan itu sama dengan kehilangan Hana, bedanya Hana kehilangan suaminya," ungkap Nirina.

Berebak pengalaman pribadi, Nirina menerima tawaran untuk memainkan peran Hana di film "JESEDEF" karya penulis sekaligus sutradara Yandy Laurens.

"Saya bilang ke Yandy, wah ini sih ngena banget. Karena memang bisa merasakan kehilangan warna seperti yang dirasakan karakter Hana di film ini," Nirina melanjutkan.

Bukan cuma dari segi cerita yang membuat Nirina merasa yakin untuk bermain di film itu, namun, juga elemen visual yang unik. Sebanyak 80 persen "JESEDEF" akan hadir dalam visual hitam putih, sedangkan sisanya

yaitu 20 persen merupakan visual berwarna.

Selain itu, tak cuma menghadirkan kesedihan, film itu juga akan dilengkapi dengan sentuhan komedi.

"Walaupun 'JESEDEF' akan menceritakan rasa sedih yang mendalam dari seorang Hana, tapi, akan hadir sentuhan komedi-komedi di dalam film yang justru akan memperkaya rasa. Sehingga, ceritanya nggak hanya di situ situ saja," kata Yandy Laurens.

"Semoga penonton relate dan bisa merasakan kehilangan warna seperti Hana, dan semoga akan banyak penonton yang berbagai rasa itu bersama Hana di bioskop mulai 30 November 2023," tutur produser film "JESEDEF" Ernest Prakasa.

Turunkan berat badan

Nirina Zubir mengaku harus menurunkan berat badannya sebanyak lima kilogram untuk peran dalam film tersebut.

Dia itu mengatakan harus menurunkan berat badannya selama satu bulan. Sebelumnya ia memiliki berat badan 50 kilogram dan kini berhasil mencapai 45 kilogram.

Serangkaian diet sehat dilakukan Nirina dengan didampingi ahli nutrisi, selain olahraga rutin setiap hari. "Aku biasa pagi-pagi lari di Gelora Bung Karno," tambahnya.

Meski dibebankan dengan tuntutan fisik itu, Nirina mengaku tidak keberatan. Dedikasi dan kecintaannya pada dunia perfilman dijadikannya alasan untuk tampil yang terbaik.

Saat berhasil menurunkan berat badan dan melakukan tes di depan kamera dengan visual hitam putih, wanita dengan dua anak itu mengaku puas melihat hasil yang dicapai.

"Kemarin kita sempat tes kamera juga kan. Ketika lihat hasilnya wah bagus banget, oh ini ya kenapa diminta menurunkan lima kilogram itu," ujarnya.

Selain menurunkan berat badan, Nirina juga dituntut untuk merawat kulit agar tekstur wajah lebih mulus dan terpancar lebih cerah pada saat visualisasi hitam putih (Ant)

“

Kalau kita ditinggal meninggal karena sakit, ibarat kita bisa mempersiapkan. Tapi, ini Mama meninggal dalam tidur dan sebelumnya kami masih ngobrol. Dan itu rasanya benar-benar kayak semua hilang. Kehilangan itu sama dengan kehilangan Hana, bedanya Hana kehilangan suaminya,"

Nirina Zubir



IMAJINARI
JAGARATHA by TRINITY ENTERTAINMENT
SINEMA
JATUH CINTA
SEPERTI DI
FILM-FILM

Sutradara Film Karya YANDY LAURENS



Ringgo AGUS RAHMAN Nirina ZUBIR Alex ABBAD Sheila DARA AISHA Dion WIYOKO Julie ESTELLE



VAKSIN HPV PALING OPTIMAL DIBERIKAN SAAT PRAREMAJA

DOKTER spesialis anak lulusan Fakultas Kedokteran UGM dr Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A menuturkan vaksin human papillomavirus (HPV) paling optimal diberikan saat seseorang memasuki praremaja dan belum aktif secara seksual dibandingkan diberikan kala dewasa.

"Kalau vaksin HPV diberikan anak karena paling optimal diberikan pada usia kira-kira pra-remaja. Optimal dalam memberikan kekebalan tubuh," kata dia yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu di Jakarta, Selasa.

Vaksinasi dikatakan dapat menjadi upaya untuk mencegah infeksi HPV, kanker serviks atau leher rahim, dan kanker terkait HPV lainnya.

Denta merujuk studi mengatakan saat vaksin diberikan pada mereka yang berusia pra-remaja yakni 9 tahun hingga 14 tahun dan belum aktif melakukan hubungan seksual, maka antibodi yang terbentuk sangat tinggi sehingga mereka hanya membutuhkan dua kali suntikan atau dua dosis. Sementara mereka yang sudah berusia 15 tahun ke atas, membutuhkan tiga dosis vaksin HPV.

Kemudian, terkait keamanan vaksin, dia berkaca pada data di Amerika Serikat dengan cakupan pemberian vaksinasi sekitar 100 juta dosis sejak tahun 2006 hingga 2016 bahwa tidak ditemukan efek samping yang parah.

"Kalau disuntik nyeri tetapi penurunan infeksi bisa hampir 100 persen," kata Denta.

Lalu, meskipun vaksin disarankan diberikan pada usia pra-remaja, namun orang-orang yang dewasa dan telah aktif secara seksual tetap bisa divaksin. Menurut dokter spesialis kebidanan dan kandungan dr Keven Tali, Sp.OG yang turut hadir dalam acara siang itu, vaksin bahkan bisa diberikan pada orang yang berusia 55 tahun.

"Usia 9 tahun -14 tahun dua dosis. Tapi orang-orang yang sudah menikah pun dan ingin divaksin, sudah punya anak pun itu masih bisa bahkan sampai usia 55 tahun juga tidak apa-apa. Misalnya ingin divaksin tinggal dikonsultasikan ke dokter," ujar dia yang menegaskan vaksin bertujuan untuk mencegah bukannya untuk mengobati penyakit.

Kemudian, selain vaksinasi, dia menyarankan orang-orang yang sudah aktif secara seksual juga menjalani pap smear.

"Jadi dimasukkan alat ke vagina lalu kita swab. Itu tindakan hanya sebentar, diperuntukkan wanita yang sudah pernah ada kontak seksual

karena memasukkan alat ke dalam vagina yang berpotensi merusak selaput dara," demikian kata Keven.

Perluas cakupan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas cakupan vaksin HPV DNA secara bertahap pada tahun 2024 untuk menangani kanker leher rahim (serviks), karena saat ini vaksin tersebut distribusinya masih terbatas di DKI Jakarta.

"Skrining vaksin HPV DNA saat ini masih khusus pada DKI Jakarta saja karena anggaran masih terbatas, tahun depan akan kami perluas secara bertahap di 16 provinsi di Indonesia untuk menangani kanker serviks," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Eva Susanti di Jakarta.

HPV adalah virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya kanker serviks, oleh karena itu dilakukan tes HPV DNA Genotyping, yakni prosedur tes berbasis molekular yang bertujuan untuk mengetahui adanya tanda-tanda infeksi HPV, diutamakan pada kelompok jenis yang dapat menimbulkan kanker pada leher rahimuteri.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Eva, ada 103 juta perempuan di atas 15 tahun yang berisiko terkena kanker serviks, menempati peringkat dua di Indonesia setelah kanker payudara, dimana ada 36 ribu perempuan yang terdiagnosis setiap tahunnya.

"70 persen wanita yang terdiagnosis sudah stadium lanjut, dan ada 21 ribu yang meninggal karena kanker serviks ini. Untuk itu kami berupaya melakukan transformasi, memperkuat layanan primer, skrining, dan vaksinasi anak usia kelas 5 dan 6 SD khusus untuk HPV DNA, dan ini sudah dilakukan secara nasional," ucap Eva.

Ia menjelaskan, saat ini vaksin gratis HPV DNA masih diprioritaskan pada anak-anak usia tersebut, dan selanjutnya akan disusun Rencana Aksi Nasional Eliminasi kanker serviks untuk menghitung berapa keperluannya untuk masyarakat Indonesia.

Eva mengutarakan, pola hidup masyarakat menjadi salah satu faktor risiko yang menyebabkan kanker.

"Banyak mengonsumsi zat-zat karsinogenik pemicu kanker atau ada perilaku faktor risiko merokok, itu kan dekat atau kuat pengaruhnya terhadap berbagai jenis kanker. Kemudian, diet yang tidak sehat, kurang makan buah

dan sayur, itu juga erat kaitannya dengan terkena kanker," paparnya.

Karena itu, Kemenkes telah menerapkan transformasi kesehatan untuk mencegah kanker, pertama yakni menguatkan ketahanan kesehatan, dengan peningkatan produk alat kesehatan dalam negeri dan penguatan tenaga kesehatan ketika terjadi bencana.

Kemudian, peningkatan sumber daya kesehatan, dengan memenuhi kebutuhan dokter spesialis, pelatihan deteksi dini kanker payudara di fasilitas kesehatan tingkat pertama pada dokter umum, dan pemeriksaan HPV DNA di puskesmas yang dapat dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan. (Ant)



"Kalau vaksin HPV diberikan anak karena paling optimal diberikan pada usia kira-kira pra-remaja. Optimal dalam memberikan kekebalan tubuh,"

dr Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A

Dokter spesialis anak lulusan Fakultas Kedokteran UGM



NVIDIA TINGKATKAN CHIP UNTUK SISTEM AI

NVIDIA pada Senin (13/11) menambahkan fitur-fitur baru pada chip andalannya untuk kecerdasan buatan, penawaran baru ini akan mulai diluncurkan tahun depan dengan Amazon.com, Google dari Alphabet, dan Oracle.

Dikutip dari Reuters, Selasa, chip yang disebut H200 akan menggantikan chip teratas Nvidia saat ini, H100. Peningkatan utamanya adalah memori dengan bandwidth tinggi, salah satu bagian termahal dari chip yang menentukan seberapa cepat data dapat diproses.

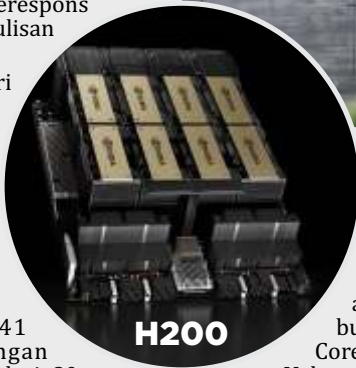
Nvidia mendominasi pasar chip kecerdasan buatan dan mendukung layanan ChatGPT dari OpenAI serta banyak layanan kecerdasan buatan generatif serupa yang merespons pertanyaan dengan penulisan mirip manusia.

Penambahan memori dengan bandwidth tinggi lebih banyak dan koneksi yang lebih cepat ke elemen pemrosesan chip berarti layanan semacam itu dapat memberikan jawaban dengan lebih cepat.

H200 memiliki 141 gigabyte memori dengan bandwidth tinggi, naik dari 80 gigabyte pada H100. Nvidia tidak mengungkapkan pemasok memori untuk chip baru ini, tetapi Micron Technology menyatakan pada bulan September bahwa mereka bekerja untuk menjadi pemasok Nvidia.

Nvidia juga membeli memori dari SK Hynix Korea, yang mengatakan bulan lalu bahwa chip kecerdasan buatan membantu menghidupkan kembali penjualan.

Nvidia pada hari Rabu mengatakan bahwa Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, dan Oracle Cloud Infrastructure akan menjadi



H200

penyedia layanan awan pertama yang menawarkan akses ke chip H200, selain penyedia layanan awan kecerdasan buatan khusus seperti CoreWeave, Lambda, dan Vultr.

Nvidia Corporation, perusahaan global yang memproduksi prosesor grafis, teknologi mobile, dan komputer desktop, didirikan pada tahun 1993 oleh tiga ilmuwan komputer Amerika, Jen-Hsun Huang, Curtis Priem, dan Christopher Malachowsky.

Perusahaan ini terkenal karena mengembangkan sirkuit terpadu yang digunakan dalam berbagai hal, mulai dari konsol game elektronik hingga komputer pribadi (PC). Nvidia adalah produsen terkemuka dalam unit pemrosesan grafis (GPU) kelas atas. Kantor pusat Nvidia berada di Santa

Clara, California.

Pada tahun 1997, Nvidia menjadi kekuatan besar dalam industri game komputer dengan meluncurkan serangkaian prosesor grafis RIVA.

Dua tahun kemudian, perusahaan ini semakin dikenal dengan peluncuran GPU GeForce 256, yang menawarkan kualitas grafis tiga dimensi yang superior.

Nvidia bersaing dengan produsen kartu video terkemuka, 3dfx Interactive, dengan meluncurkan GeForce untuk bersaing dengan teknologi Voodoo yang populer dari 3dfx Interactive.

Nvidia akhirnya memenangkan persaingan itu dan membeli aset yang tersisa dari 3dfx Interactive pada tahun 2000.

Pada tahun yang sama, Microsoft Corporation memilih Nvidia untuk mengembangkan kartu grafis untuk konsol game video Xbox yang lama

ditunggu-tunggu.

Pada tahun 2007, Nvidia dihormati sebagai Perusahaan Tahun ini oleh majalah Forbes karena pertumbuhan dan kesuksesannya yang pesat. Selain produk untuk industri game komputer, teknologi komputasi Nvidia yang luas mencakup serangkaian kartu video Quadro untuk grafis profesional, seri Tegra untuk ponsel seluler, seri nForce untuk fungsi multimedia, dan seri Tesla untuk komputer bisnis dan penelitian ilmiah kelas atas.

Nvidia kini sedang mendekati posisi untuk bergabung dengan daftar perusahaan publik elite dengan kapitalisasi pasar lebih dari \$1 triliun, karena harga saham perusahaan teknologi ini melonjak lebih dari 25 persen sejak merilis proyeksi keuangan yang sangat optimistis.

Proyeksi tersebut menjelaskan bagaimana booming kecerdasan buatan (AI) mendorong permintaan chip (berbagai sumber)





KIAT KELOLA STRES MENJALANI PERAN SEBAGAI ORANG TUA

DALAM menjalani keseharian, seseorang bisa mudah untuk merasa stres dan kewalahan, terutama jika menjalani peran sebagai orang tua.

Ditulis laman Popsugar, Senin (13/11/2023), seorang dokter dari Harvard Aditi Nerucar menyebut ketika mengalami stres, otak mengirimkan sinyal stres ke tubuh yang disebut respons melawan-atau-lari.

Respons biologis inilah yang digambarkan sebagai "perasaan stres" yang menyebabkan jantung berdebar kencang, wajah memerah, napas lebih cepat, dan pikiran negatif.

Ada beberapa cara efektif untuk mengatasi stres yang semakin meningkat dalam jangka pendek dan mencegahnya memburuk dalam jangka panjang.

Pertama lakukan pernapasan dengan diafragma karena nafas adalah pintu gerbang untuk mengurangi stres. Respons stres dengan mengaktifkan pernapasan yang cepat dan dangkal.

Memperlambat pernapasan ketika mengambil napas dalam-dalam akan mengirimkan sinyal ke amigdala untuk beralih dari mode melawan-atau-lari ke mode istirahat dan cerna.

Cara melatih pernapasan diafragma adalah, pertama, letakkan satu atau kedua tangan di perut, lalu tarik napas perlahan melalui hidung, biarkan perut terangkat. Buang napas perlahan melalui hidung atau mulut, biarkan perut mengempis.

Ulangi siklus pernapasan diafragma ini selama tiga siklus napas. Setelah itu beristirahatlah, bernapaslah dengan normal, lalu ulangi untuk beberapa siklus lagi.

Memperlambat pernapasan dengan cara ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengatur ulang

otak dan tubuh agar mengurangi stres. Cara itu secara aktif menurunkan regulasi respons stres pada saat itu.

Selain itu, seseorang juga bisa melakukan Metode Berhenti-Bernafas (stop-breath-be). Metode ini membantu memperkuat hubungan pikiran dan tubuh di mana pun dia berada, dengan siapa dia berada, atau apa pun yang dilakukan.

Jika dilakukan beberapa kali sepanjang hari, metode itu juga dapat memperlambat stres yang tak terkendali. Seseorang dapat mempraktikkan metode ini saat melakukan tugas sehari-hari dan berulang, termasuk mencuci piring, membungkus kado, atau memasak.

Metode bernapas itu juga dapat dipraktikkan tepat sebelum momen menegangkan seperti pesta liburan, kunjungan keluarga, memesan perjalanan liburan, atau berbelanja oleh-oleh.

Luangkan waktu sejenak dan hentikan tugas yang akan dilakukan. Ambil napas dalam-dalam dan tenangkan diri. Lalu fokuslah pada saat ini.

Terakhir, memanfaatkan hubungan pikiran-tubuh juga bisa dengan teknik yang disebut meditasi gerakan. Setiap hari, usahakan untuk

berjalan-jalan sebentar di luar ruangan jika memungkinkan.

Pertahankan kecepatan tetap dan fokus pada kaki saat mengartikulasikannya di tanah. Perhatikan juga pernapasan dan postur tubuh saat berjalan. Mulai gerakan itu selama lima menit sehari yang dapat membuat perbedaan dan membantu menghilangkan stres. Lalu terapkan bertahap hingga 20 menit setiap hari.

Ganti sesi dengan beberapa meditasi gerakan. Teknik itu membantu seseorang keluar dari pikiran dan kembali ke tubuhnya, dan ini merupakan cara yang sangat efektif untuk menghilangkan stres dari dalam ke luar.

Ketiga teknik sederhana, namun, efektif itu dapat dengan mudah diterapkan dalam kehidupan yang padat jadwal sebagai orang tua yang sibuk dengan sedikit usaha.

Bersenang-senang

Terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengampanyekan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental melalui gaya hidup sehat dan rutin berolahraga, karena bersenang-senang kunci kesehatan jiwa.

"Kesehatan mental lagi tren. Jangan lupa senang-senang, dengarkan musik, ngobrol dengan keluarga, dan juga rajin berolahraga supaya jiwanya juga sehat," kata Budi Gunadi Sadikin di sela Festival Ayo Sehat dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2023 di Jakarta, Sabtu.

Budi mengatakan definisi sehat bukan hanya sehat fisik, tapi sehat mental demi menunjang rutinitas sehari-hari.

Menurut Budi saat ini satu dari sepuluh orang di Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa dengan beragam tingkatan.

"Selain itu, gangguan kesehatan jiwa juga menjadi sorotan dunia, di mana satu dari delapan orang di dunia atau setara sekitar 910 juta orang mengalami gangguan kesehatan jiwa," kata Budi menambahkan.

Dia mengategorikan gangguan kesehatan jiwa menjadi tiga jenis, yakni anxiety yang ditandai dengan perasaan resah dan tidak tenang, depresi, dan pada tahap akhir menjadi skizofrenia.

Selain kesehatan mental, kata Budi, cara mudah untuk hidup sehat, cukup dengan mengatur pola makan dan olahraga teratur. (Ant)



"Kesehatan mental lagi tren. Jangan lupa senang-senang, dengarkan musik, ngobrol dengan keluarga, dan juga rajin berolahraga supaya jiwanya juga sehat,"

BUDI GUNADI SADIKIN
Menteri Kesehatan (Menkes) RI

Dua Tahun Kisruh (dari Hal 1)

ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia akan membawa masalah utang pemerintah kepada para pengusaha ritel terkait rafaksi minyak goreng ke jalur hukum. Tuntutan akan diajukan Aprindo bersama lima produsen minyak goreng. "Nilai piutang yang dipermasalahkan secara total masih dihitung kembali karena nilai itu yang akan diperjuangkan di jalur hukum," kata Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey dalam konferensi pers, Rabu (15/11/2023).

Roy tidak menyebutkan siapa saja lima produsen yang akan mengajukan tuntutan hukum. Namun, ia mengatakan ada dua pilihan jalur hukum yang dimaksud, yakni laporan ke polisi dan tuntutan di pengadilan. Kedua pilihan tersebut sedang didiskusikan oleh kuasa hukum peritel dan produsen minyak goreng saat ini.

Menurut Roy, proses diskusi oleh kuasa hukum tersebut akan rampung dalam waktu dekat. Namun, ia belum mengumumkan jadwal pasti pelaporan atau penuntutan tersebut akan dilakukan. Permendag Nomor 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Roy menyampaikan peritel modern langsung melakukan mandat aturan tersebut sehari setelah diterbitkan. Menurutnya, uang ganti rugi tersebut sebenarnya telah siap disalurkan oleh BPDPKS. Namun proses pembayaran tersebut tersendat oleh verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Ia mengatakan, proses pembayaran piutang rafaksi tersebut tersendat lantaran Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum melakukan rapat koordinasi.

Rapat tersebut merupakan rekomendasi hukum oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Ham terkait penyelesaian piutang tersebut. Menurut Roy, pemerintah belum kunjung melakukan rapat tersebut dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, Roy menilai niat pemerintah dalam menyelesaikan piutang tersebut telah tidak ada.

"Kenapa harus diselesaikan lewat jalur hukum? Karena kami enggak dapat kepastian, niat pemerintah bahkan juga sudah enggak ada," katanya.

Roy pemerintah tak kunjung membayar selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng yang sudah berjalan hampir dua tahun ini. "Rencana kami untuk berkembang menggunakan uang modal, berkembang untuk buka toko retail baru di berbagai provinsi, itu kan tertahan. Karena masih ada dana yang di pemerintah yang belum dibayarkan kepada kami," katanya. "Ditambah lagi dengan rafaksi ini yang sudah berapa lama? Rugi net price and value kan? Nilai uangnya kan sudah turun. Sudah

setahun lebih kan?" tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menjelaskan, jadwal Rakortas sulit ditentukan lantaran harus menyelaraskan jadwal beberapa menteri. Oleh karena itu, Isy mengatakan penentuan jadwal Rakortas menjadi kunci pembayaran utang rafaksi minyak goreng pemerintah. Ia berharap agar Rakortas tersebut dapat rampung sesegera mungkin.

"Saya belum bisa menjamin bulan ini atau bulan depan selesai masalah ini. Utang rafaksi minyak goreng itu bukan hanya beban moril bagi saya, tapi juga akan terus menerus menguras energi saya," kata Isy dalam Indonesian Palm Oil Conference 2023, Kamis (2/11/2023).

Isy sebelumnya berargumen masih ada perbedaan data penjualan minyak goreng kemasan selama Permendag No. 3-2022 berlaku pada 19-31 Januari 2022. Ia menemukan utang minyak goreng yang harus dibayar pemerintah berdasarkan verifikasi Sucofindo hanya Rp 472 miliar, hampir setengah dari tagihan yang diklaim pengusaha ritel sebesar Rp 812 miliar.

"KPPU itu kan angka di KPPU yang Rp1,3 triliun. Jadi yang di Kemendag yang rafaksi itu angkanya bukan segitu. Data perusahaan itu datanya Rp800 jutaan, (sekitar) Rp814 juta atau Rp812 juta. Itu data resmi dari perusahaan-perusahaan yang ikut rafaksi. Tagihan hitam di atas putih. Nah dari angka itu kemudian dilakukan verifikasi akhirnya keluar jadi Rp470 jutaan, itu hasil verifikasi Sucofindo sebagai surveyor independen yang ditunjuk oleh kemendag," jelasnya.

Sebagian besar harga pangan hari ini, Rabu (15/11/2023) tercatat mengalami penurunan rata-rata secara nasional. Adapun, pangan yang harganya melandai yakni beras medium, bawang putih bonggol, cabai, gula, hingga minyak goreng. Komoditas minyak goreng curah yang turun 1,50% menjadi Rp14.330 per liter, sedangkan harga minyak goreng kemasan turun sebesar 1,50% menjadi Rp17.100 per liter.

Dugaan Oligopoli

Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya dugaan praktik oligopoli atau penguasaan pasar oleh perusahaan besar untuk beras, minyak goreng hingga bawang putih. Hal tersebut disampaikan oleh Lely Pelitasari Soebekty saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPPU periode 2023-2028 bersama Komisi VIDPR.

"Beberapa pangan strategis diduga, atau selama ini, dilihat sebagai strukturnya berpotensi pada oligopoli, benarkah? Beras, gula, minyak goreng, garam, jagung, bawang putih, menjadi komoditas pokok yang dipantu penuh oleh Badan Pangan Nasional, salah satunya," ujarnya, dikutip Rabu (15/11/2023).

Lely memaparkan situasi komoditas minyak goreng saat ini tercatat oligopoli ketat konsentrasi tinggi, di mana harga minyak goreng sudah lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni sebesar Rp 14.000 per kilogram. Adapun untuk gula, garam, jagung dan bawang putih bermasalah dengan kisruh impor.

Kemudian beras, Lely menyoroti dari 190.000 penggilingan yang ada, 90 persen di antaranya merupakan penggilingan kecil. Lely yang juga pernah mengabdikan di Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) tersebut menyampaikan pada dasarnya terdapat dua pola yang kerap terbentuk dalam krisis komoditas tersebut, yaitu lonjakan harga dan anjlokkan. Oleh sebab itu menurut dia, dibutuhkan peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha yang terjadi terhadap komoditas tersebut

Sebelumnya, dalam Putusannya, Majelis Komisi menjelaskan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia. Struktur pasar dalam industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi (yakni dengan konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52%), memiliki produk yang homogen dan berbagai hambatan masuk pasar. Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para Terlapor.

Dalam persidangan, Majelis Komisi menemukan bahwa berdasarkan rasio input dan output di sektor tersebut, pada periode pelanggaran lebih besar daripada rasio sebelum periode pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pada periode pelanggaran terjadi akibat adanya kenaikan harga input, sehingga margin keuntungan yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dengan demikian para Terlapor dapat disimpulkan tidak melakukan penetapan harga untuk minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan.

Majelis Komisi juga menemukan bahwa para Terlapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni dengan melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Faktanya, pada saat kebijakan HET dicabut, serta merta pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum diterbitkan kebijakan HET.

Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat. Perilaku penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan pada periode pelanggaran meskipun bahan baku tersedia ini, merupakan perilaku pelaku usaha yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha dalam melakukan

kegiatan produksi dan/atau pemasaran minyak goreng kemasan. Sehingga Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi dampak pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam proses penyusunan Putusan, salah satu Anggota Majelis Komisi, yakni Ukay Karyadi, S.E., M.E., memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh Terlapor patut dinyatakan melanggar pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. (wid,rls, ist/dya)

PROGRAM MINYAK GORENG PEMERINTAH

PROGRAM

- Bantuan Langsung minyak goreng 18 juta kpm
- 10.000 titik jual Rp 14.000 (MGC 14 ribu)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

- Kemenko Perekonomian- BUMN/Bulog
- Kemendag- BUMN/IDFood

SASARAN

- 18,3 Juta KPM
- 40 Juta RT miskin dan rentan miskin + usaha mikro

JENIS MINYAK GORENG

- 2 liter kemasan sederhana per bulan
- Curah, Pembelian 1 atau 2 liter per hari

PARTISIPASI

- Produsen minyak goreng, Bulog
- Produsen minyak goreng, D1, Pengecer, dan Pembeli

APLIKASI DIGITAL

- Basis data PKH/KPM
- - Gurih-Indomarco
- - Warung Pangan-ID Food

SUBSIDI

- BPDPKS
- Pelaku usaha/bisnis

PERKIRAAN JUMLAH MINYAK GORENG

- 37 juta liter kemasan sederhana/bulan
- 60 juta liter curah/bulan

KETERANGAN

- Sudah Dilaksanakan
- Disiapkan

MGC : Minyak Goreng Curah
KPM : Keluarga Penerima Manfaat
PKH : Program Keluarga Harapan

Sumber :
Kementerian
Perdagangan



DPRD JATIM SAHKAN APBD 2024, FOKUS PENUNTASAN VISI MISI GUBERNUR



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Pimpinan DPRD Jatim melakukan penandatanganan persetujuan penetapan Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2024 menjadi Perda, Rabu (15/11/2023).

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 menjadi Perda. Persetujuan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (15/11/2023).

Dari persetujuan tersebut diketahui besaran APBD Jatim tahun 2024 untuk pendapatan daerah sebesar Rp 31.418.164.711.007. Sedangkan untuk belanja daerah mencapai Rp 33.265.021.983.864. Dengan demikian defisit anggaran daerah sebesar Rp 1.864.857.272.857 yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah netto.

Terkait dengan besaran anggaran tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengungkapkan bahwa yang menjadi fokus pada APBD 2024 mendatang adalah merampungkan visi misi gubernur, karena tahun 2024 adalah tahun akhir sakalipun sebenarnya waktu gubernur hanya sampai pada 31 Desember 2023 besok.

"Tapi visi misi, siapapun yang menjadi Pj (Penjabat Gubernur) berkewajiban secara konstitusional untuk melanjutkan. Satu diantaranya adalah terkait dengan perekonomian untuk melaju cepat untuk mencapai Indonesia maju sesuai dengan tagline Indonesia," tandasnya, Rabu (15/11/2023).

Kemudian, masalah kemiskinan

juga menjadi fokus. Anik menandakan, meski saat ini tingkat kemiskinan di Jatim pada posisi terbagus, tercepat, terbaik, tertinggi dalam penurunan kemiskinan ekstrem yang saat ini tinggal 0,82%. "Tetapi kemiskinan secara umum secara generalisasi masih lebih tinggi sedikit dari nasional, itu yang menjadi PR yang harus terselesaikan tahun 2024," tegasnya.

Masalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menjadi fokus. Sebab, saat ini TPT di Jatim masih tinggi sehingga perlu di-push lagi terkait dengan program-program padat karya. Terlebih lagi, saat ini juga proses menuju penetapan Perda perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Di mana, 58% persen dari PDRB Jatim adalah di-support pelaku UMKM. Untuk itu, Anik mengharapkan supaya APBD 2024 ini sudah bisa direalisasikan pada Januari 2024 mendatang.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Abdul Halim mengatakan program-program yang direncanakan oleh Gubernur hanya akan berjalan dengan baik dan sesuai target manakala diimplementasikan dalam kondisi masyarakat yang kondusif.

"Asumsi bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta intensifikasi pengurangan kemiskinan berpengaruh besar terhadap kondusifitas suatu daerah tidaklah salah, namun demikian kesiapan yang matang dan upaya-

upaya antisipasi dengan melibatkan seluruh pihak-pihak dan elemen terkait untuk menjamin keamanan dan kondusifitas harus terus ditingkatkan," katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Aziz, mengatakan bahwa tema agribisnis dan ekonomi inklusif masih akan terus menjadi tantangan. Untuk itu dia mendesak supaya jajaran perbankan BUMN, dan bank BUMD segera meningkatkan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Tani (KUT), dan Dana Bergulir.

"Sebagai catatan, KUR, KUT, dan Dana Bergulir, masih sulit diakses oleh masyarakat pelaku usaha mikro. Kami menggarisbawahi sulit akses pembiayaan ini dengan realita yang mengejutkan bahwa Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur merilis angka penyaluran kredit di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 45,62 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," tandasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan data hingga akhir Agustus 2023 realisasi kredit di Jawa Timur mencapai Rp 23,80 triliun, angka tersebut turun jika dibanding periode yang sama di tahun 2022 yang mencapai Rp 43,77 triliun.

"Penurunan ini tidak tanggung-tanggung hingga separuh dari tahun sebelumnya. Ada apa yang demikian? Daya beli yang lesu? Iklim usaha yang tidak menjanjikan? Barang impor yang makin banyak membanjiri atau peran pemerintah Jawa Timur yang tidak maksimal? Ini kita perlu cari jawabannya untuk memberikan solusi bagi petani dan UMKM ke depan," tegasnya.

Kemudian, Fraksi PAN juga mengapresiasi mandatory spending pada bidang kesehatan. Dengan salah satu fokus pada stunting menjadikan penurunan stunting cukup signifikan pada 2022, dengan menyisakan Kabupaten Jember, Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso sebagai kontributor tertinggi.

"Fraksi PAN perlu mengingatkan bahwa anggaran stunting atau apapun dalam rangka intervensi kondisi, adalah untuk benar-benar menasar target. Anggaran tidak untuk hal-hal yang bersifat administratif atau sejenisnya sebagaimana hal ini pernah disinyalir oleh Presiden dalam forum BPKP," pungkasnya.

Sedangkan, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Karimullah Dahrujadi mengatakan bahwa berat belanja daerah pada 2024 masih pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan PU/Infrastruktur. Berikutnya sektor Pertanian dan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Pemerintahan Umum.

Sektor Pendidikan dianggarkan Rp 8,4 triliun atau sudah lebih 28%. Sektor Kesehatan setidaknya mencapai Rp 5,2 triliun lebih (19,5% di luar belanja gaji dan tunjangan) untuk Penguatan RSU/RSUD dan Ponkesdes, penyiapan Tantistas warga miskin maupun pemantapan sistem BLUD. Provinsi terus berupaya meraih UHC 98% di tahun 2024 guna meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selanjutnya adalah infrastruktur dimana yang menjadi prioritas adalah pembangunan SPAM di lokasi rawan kekeringan serta penggalian sumur bor berikut jaringan perpipaan di 50 lokasi. Di sisi lain juga penyediaan transportasi umum dan peningkatan kualitas perlengkapan jaringan jalan guna kelancaran konektivitas sosial-ekonomi. Sektor infrastruktur didukung dana Rp 5,93 triliun (25,4% di luar belanja transfer) untuk meraih target cakupan 40% infrastruktur pelayanan publik.

"Sosial, dilakukan kebijakan strategis untuk mereduksi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi melalui 7 program unggulan dalam bentuk BLT," tandasnya.

Sementara itu, Sekda Prov Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa dari postur anggaran tersebut maka untuk prioritas pertama adalah Pendidikan. Di mana sebenarnya untuk anggaran Pendidikan minimal 20% dari APBD, namun anggaran Pendidikan di Jatim sudah mencapai 26,7%.

"Kemudian dari kesehatan yang dipatok harus 10 %, kita sudah mencapai hampir 15% dan tentu target kami adalah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang tinggal 0,82 %. Mudah udahan di akhir tahun ini bisa turun lagi menjadi 0,6 atau 0,5 %. Maka, kita akan tuntaskan dengan belanja untuk bantuan sosial, untuk penanggulangan kemiskinan, dan juga untuk antisipasi terkait bencana," tagasnya. (Lut/dya/ADV)